

SKRIPSI

**PERAN DPD PDI-P SUMATERA SELATAN DALAM MENINGKADERISASI
BAKAL CALON LEGISLATIF PEREMPUAN
(STUDI PADA PENGURUS BIDANG
KADERISASI)**



**I MADE SETIAWAN
07021281823062**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

SKRIPSI

PERAN DPD PDI-P SUMATERA SELATAN DALAM MENINGKADERISASI BAKAL CALON LEGISLATIF PEREMPUAN (STUDI PADA PENGURUS BIDANG KADERISASI)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



I MADE SETIAWAN

07021281823062

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

**“PERAN DPD PDI-P SUMATERA SELATAN DALAM MENINGKADERISASI
BAKAL CALON LEGISLATIF PEREMPUAN
(STUDI PADA PENGURUS BIDANG
KADERISASI)”**

Skripsi

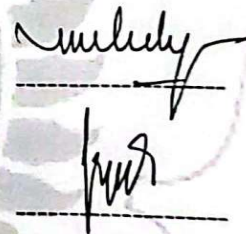
I Made Setiawan
07021281823062

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 14 Juni 2024**

Pembimbing :

1. Dra. Eva Lidya, M.Si
NIP. 195910241985032002
2. Safira Soraida, S.Sos., M.Sos
NIP. 198209112006042001

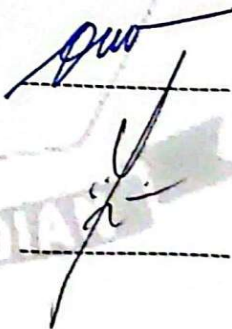
Tanda Tangan



Penguji :

1. Dr. Yoyok Hendarso, M.A
NIP. 196006251985031005
2. Yulasteriyani, S.Sos., M.Sos.
NIP. 199206062019032025

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Ketua Jurusan



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“PERAN DPD PDI-P SUMATERA SELATAN DALAM MENINGKADERISASI
BAKAL CALON LEGISLATIF PEREMPUAN
(STUDI PADA PENGURUS BIDANG
KADERISASI)”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1**

Oleh :

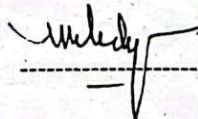
**I Made Setiawan
07021281823062**

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

1. Dra. Eva Lidya, M.Si
NIP. 195910241985032002



Pembimbing II

2. Safira Soraida, S.Sos., M.Sos
NIP. 198209112006042001



Mengetahui,
Ketua Jurusan,



**Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, TEKNOLOGI DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I MADE SETIAWAN

NIM : 07021281823062

Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “PERAN DPD PDI-P SUMATERA SELATAN DALAM MENINGKADERISASI BAKAL CALON LEGISLATIF PEREMPUAN (STUDI PADA PENGURUS BIDANG KADERISASI)” ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Inderalaya, 28 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,




I MADE SETIAWAN
NIM. 07021281823062

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

Canakya Niti Sastra Bab X.1

“dhana hina na hinas ca dhanikah sa suniscayah vydiratnena yo hinah sa hinah sarvavastusu”

Artinya : *“Orang yang kurang dalam harta benda, bukanlah orang miskin. Sebaliknya, orang kaya adalah dia yang memiliki ilmu pengetahuan. Dia yang kurang dalam ilmu pengetahuan, sesungguhnya dalam segala keadaan ia disebut orang miskin”*.

“Selama dengan buku, kalian bisa memenjarakanku dimana saja. Karena dengan buku, aku merasa bebas” - Dr. Drs. H. Mohammad Hatta

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa
2. Orangtua dan Keluarga
3. Orang – orang terdekat, baik teman maupun sahabat
4. Pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini
5. Almamater kebanggaan Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas *Asung Kertha Wara NugrahaNya* lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN DPD PDI-P SUMATERA SELATAN DALAM MENINGKADERISASI BAKAL CALON LEGISLATIF PEREMPUAN (STUDI PADA BIDANG KADERISASI)”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana S-1 Jurusan Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan kekurangan, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini dapat dicapai oleh penulis tentunya tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan rasa kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M. Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Rujito Agus Suwignyo, M. Agr selaku Wakil Rektor I Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. Tertiarto Wahyudi, MAFIS selaku Wakil Rektor II Universitas Sriwijaya
4. Ibu Prof. Dr. dr. Radiyah Umi Partan, SpPD-KR, M. Kes selaku Wakil Rektor III Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. ENG. Ir. H. Joni Arliansyah, MT selaku wakil Rektor IV Universitas Sriwijaya
6. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. H. Azhar., SH. M. Sc., LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
8. Ibu Hoirun Nisyak, S. Pd., M. Pd selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Andries Lionardo, M. Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
10. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, S. Sos., M. Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Gita Isyana Wulan, S. Sos., MA selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
12. Ibu Dra. Eva Lidya, M. Si selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan dan memberikan banyak masukan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
13. Ibu Safira Soraida, S. Sos., M. Sos selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Bapak DR. Ridhah Taqwa selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi masukan kepada penulis selama proses perkuliahan.
15. Seluruh dosen Sosiologi yang telah memberikan banyak ilmu, arahan, dan pengalamannya selama perkuliahan. Seluruh staff dan karyawan FISIP Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan dan bantuannya.
16. Ibu Yuni Yunita, S. Sos selaku admin Jurusan Sosiologi FISIP UNSRI yang telah banyak membantu penulis dalam segala kepentingan akademik dan administrasi selama perkuliahan.
17. Orangtua (kandung) tercinta Bapak I Ketut Siantana dan Ibu Ni Gede Yasa. Terimakasih untuk segala kasih, doa dan dukungan sehingga penulis bisa sampai dititik ini.
18. Orangtua (angkat) tercinta Bapak I Nyoman Trima dan Ibu Ni Nyoman Sutriani. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang serta kehangatan dalam keluarga yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa ada sampai hari ini.

19. Keluarga besar penulis terimakasih telah memberikan banyak dukungan kepada penulis.
20. Saudari Paskah Gloria. Terimakasih sudah selalu menemani, selalu bisa menjadi tempat untuk “pulang”, selalu bisa menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah. Terimakasih sudah menjadi yang terbaik selama masa perkuliahan, semoga yang terbaik juga untuk kedepannya.
21. Saudara Gusti Ngurah Sute. Terimakasih sudah menjadi mentor dalam segala hal. Terimakasih sudah menjadi sosok panutan, kakak dan juga sahabat bagi penulis.
22. Teman-teman terdekat penulis Julietha Sabela, Rolim Wijaya, Farhan Nugraha, Tiara Delonix, Putri Adelya.
23. Teman-teman di Jurusan Sosiologi Angkatan 2018.
24. Teman-teman Pengurus Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Sumatera Selatan 2020/2022, serta seluruh kader.
25. Bapak/Ibu Pengurus DPD PDI-P Sumatera Selatan.
26. Semua informan yang telah bersedia menjadi narasumber bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
27. Penulis berterimakasih untuk diri sendiri. Terimakasih untuk tetap terus hidup.

Untuk semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga kabaikan pihak yang terkait dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena ada keterbatasan ilmu dan hal lainnya dan sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Tuhan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat terbuka untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan untuk penelitian selanjutnya.

Indralaya, Mei 2024

Penulis,

I Made Setiawan

NIM. 07021281823062

RINGKASAN

PERAN DPD PDI-P SUMATERA SELATAN DALAM MENINGKADERISASI BAKAL CALON LEGISLATIF PEREMPUAN (STUDI PADA PENGURUS BIDANG KADERISASI)

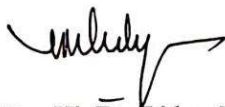
Pemberdayaan Perempuan merupakan usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dan tentunya dalam berpolitik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran dan penghambat DPD PDI-P Sumatera Selatan dalam meningkatkan kaderisasi bakal calon legislatif perempuan. Dengan menggunakan konsep Cook & Macaulay (1997) tentang pemberdayaan, penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam pada informan, dokumentasi serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran bidang kaderisasi DPD PDI-P Sumatera Selatan dalam meningkatkan kaderisasi bakal calon legislatif perempuan adalah dengan cara memberikan pelatihan dan melakukan rekrutmen. Adapun penghambat bidang kaderisasi DPD PDI-P Sumatera Selatan dalam meningkatkan kaderisasi bakal calon legislatif perempuan adalah adanya faktor budaya dan faktor individu.

Kata Kunci: Peran, DPD, Kaderisasi, Legislatif Perempuan.

Indralaya, 30 Mei 2024

Mengetahui/menyetujui

Pembimbing I



Dra. Hj. Eva Lidya, M.Si
NIP. 195910241985032002

Pembimbing II



Safira Soraida, S.Sos., M.Sos
NIP. 198209112006042001

Ketua Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Dr. Diana Dewi Sartika, M. Si
NIP. 198002112003122003

SUMMARY

THE ROLE OF THE DPD PDI-P SOUTH SUMATRA IN CADERIZING WOMEN LEGISLATIVE CANDIDATES (STUDY ON CADERIZATION MANAGEMENT)

Women's empowerment is a systematic and planned effort to achieve gender equality and justice in family and community life and of course in politics. This research aims to describe the role and obstacles of the South Sumatra PDI-P DPD in caderize of female legislative candidates. By using Cook & Macaulay's (1997) concept of empowerment, this research is qualitative in nature with data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews with informants, documentation and literature study. The results of this research show that the role of the South Sumatra PDI-P DPD caderization sector in caderizing female legislative candidates is by providing training and carrying out recruitment. Then, the obstacles in the caderize field of the South Sumatra PDI-P DPD cadre in caderizing female legislative candidates are cultural and individual factors.

Keywords: Role, DPD, Cadreization, Women's Legislators.

Indralaya, May 30th 2024

Certify

Advisor I



Dra. Hj. Eva Lidya, M.Si
NIP. 195910241985032002

Advisor II



Safira Soraida, S.Sos., M.Sos
NIP. 198209112006042001

Head of Sociology Department

Faculty of Social and Political Science

Sriwijaya University



Dr. Diana Dewi Sartika, M. Si
NIP. 198002112003122003

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN ORISIONALITAS	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN	x
SUMMARY	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	7
2.1 Penelitian Relevan.....	7
2.2 Kerangka Berpikir	17
2.2.1 Konsep Pemberdayaan	17
2.2.2 Konsep Peran	19
2.2.3 Konsep Partai Politik.....	20
2.2.4 Konsep Perempuan.....	21
2.3 Pendekatan Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Desain Penelitian.....	25
3.2 Lokasi Penelitian	26
3.3 Strategi Penelitian	27
3.4 Fokus Penelitian	28

3.5 Jenis dan Sumber Data	30
3.5.1 Data Primer	30
3.5.2 Data Sekunder	30
3.6 Penentuan Informan	31
3.7 Peran Peneliti	32
3.8 Unit Analisis Data	32
3.9 Teknik Pengumpulan Data	33
3.10 Uji Keabsahan Data.....	35
3.11 Teknik Analisis Data.....	37
3.12 Jadwal Kegiatan Penelitian	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
4.1 Gambaran Umum PDI-P	40
4.1.1 Sejarah.....	40
2.3.1 Visi dan Misi.....	41
2.3.2 Fungsi.....	42
2.3.3 Tugas.....	42
2.3.4 Jenjang Kepengurusan PDI-P	43
2.3.5 DPD PDI-P Sumatera Selatan.....	48
4.2 Gambaran Umum Informan Penelitian	51
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	53
5.1 Peran DPD PDI-P Sumatera Selatan dalam Mengkaderisasi Bakal Calon Legislatif Perempuan	53
5.1.1 Melakukan Pelatihan.....	54
5.1.2 Melakukan Rekrutmen.....	57
5.2 Hambatan Bidang Kaderisasi DPD PDI-P Sumatera Selatan Dalam Mengkaderisasi Bakal Calon Legislatif Perempuan	65
5.2.1 Faktor Budaya.....	66
5.2.2 Faktor Individu.....	68
BAB VI PENUTUP	73
6.1 Kesimpulan	73
6.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA.....	81
LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN	97
LAMPIRAN LEMBAR PERBAIKAN UJIAN KOMPREHENSIF	101

LAMPIRAN BUKTI HASIL TES PLAGIAT..... 102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Anggota DPRD SUMSEL Fraksi PDO-P	4
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	29
Tabel 4.1 Kepengurusan Tingkat Provinsi	48
Tabel 4.2 Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Daerah	49
Tabel 4.3 Keanggotaan Tingkat Kabupaten/Kota	50
Tabel 4.4 Informan Utama	52
Tabel 4.5 Informan Pendukung	52
Tabel 5. 1 Peran DPD PDI-P Sumatera Selatan Dalam Mengkaderisasi Bakal Calon Legislatif Perempuan	62
Tabel 5. 2 Hambatan Bidang Kaderisasi DPD PDI-P Sumatera Selatan Dalam Mengkaderisasi Bakal Calon legislatif Perempuan	70

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran.....	24
Bagan 5. 1 Peran DPD PDI-P Sumatera Selatan dalam Mengkaderisasi Bakal Calon Legislatif Perempuan	56
Bagan 5. 2 Hambatan Bidang Kaderisasi DPD PDI-P Sumatera Selatan Dalam Mengkaderisasi Bakal Calon Legislatif Perempuan	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Platform aksi Beijing (1955) dan Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women / CEDAW*) pada 1979 merekomendasikan agar semua pemerintah di dunia memberlakukan kuota sebagai langkah khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan yang berada pada jabatan-jabatan appointif (berdasarkan penunjukan/pengangkatan) maupun elektif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat pemerintahan lokal dan nasional.

Saat ini, hak-hak politik perempuan diakui secara luas, dan lebih dari 98% negara di dunia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tahun 1979. Hak-hak perempuan dalam kehidupan politik dan sosial di negaranya diatur dalam pasal 7 Konvensi Perempuan. Hak ini meliputi: (1) Hak untuk memilih dan dipilih. (2) hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya; (3) Hak untuk memegang jabatan pemerintahan dan menjalankan seluruh fungsi pemerintahan pada semua tingkatan. (4) Hak untuk berpartisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan organisasi yang berkaitan dengan kehidupan nasional dan politik negara. Dalam hal ini, pengakuan formal atas kesetaraan dalam politik tidak cukup untuk mendorong perempuan berpartisipasi aktif dan mengatasi berbagai kendala sosial, ekonomi, politik, dan hambatan lainnya. Dicatat bahwa pengakuan formal hanyalah langkah pertama untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Langkah selanjutnya adalah perlunya perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan yang telah lama terpinggirkan (Paxton & Hughes, 2007).

Ketidakseimbangan jumlah perempuan di lembaga legislatif kini semakin menjadi sorotan, sejalan dengan pengesahan kebijakan pemberdayaan perempuan di sektor politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa:

“Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.”

Bentuk perhatian pemerintah juga tertulis dalam sebuah kebijakan *affirmative action* didalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 246 ayat (2) menyatakan *“didalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.”* Politik tindakan afirmatif merupakan bentuk diskriminasi aktif terhadap perempuan Indonesia yang terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan dan proses pengambilan keputusan di parlemen. Dengan kebijakan ini, kesadaran gender di kongres perlahan tapi pasti membangkitkan kembali perjuangan dan harapan perempuan akan keadilan. Kebijakan *affirmative action* diharapkan dapat mengubah wajah kongres yang bias terhadap kepentingan patriarki, menuju kebijakan yang lebih ramah perempuan.

Partai politik (parpol) merupakan wadah masyarakat menyampaikan aspirasi politiknya. Dalam kegiatan pemilu, partai politik mempunyai peranan yang sangat penting dan berpartisipasi aktif sebagai pemilik sumber daya, yaitu sebagai calon anggota parlemen dan pemimpin pemerintahan. Sebagai pelaku partisipasi politik, partai politik harus menyediakan sumber daya manusia terbaik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (policy-making). Di sini, kehadiran partai politik memegang peranan penting dalam setiap pemilu.

Sejumlah partai politik memberi peran kepada kaum perempuan dalam kepemimpinan partai politik, hal ini merujuk pada pasal 2 ayat 5 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang berbunyi : *“Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) disusun dengan menyertakan paling rendah 30 persen (tiga puluh per seratus) keterwakilan*

perempuan.” Namun, partai lebih banyak memberikan peran kepada perempuan untuk sekedar memenuhi formalitas yang ditentukan undang-undang, perempuan lebih kurang ditempatkan pada posisi sekretaris, bendahara atau peran-peran yang terkait dengan konsumsi, dan kesenian.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan sebuah partai yang dibentuk pada 10 Januari 1973 sebagai Partai Demokrasi Indonesia, dan pada 15 Februari 1999 berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). PDI-P secara eksplisit mencantumkan Pancasila sebagai ideologi partai di AD/ART sejak partai ini berdiri 1973. Peran perempuan dalam organisasi internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, khususnya dalam mewujudkan kebijakan yang responsif gender dapat terlihat pada anggaran dasar partai pasal 20 ayat 3 mengenai penugasan dalam jabatan politik dan jabatan publik yang berbunyi : *“Penempatan anggota partai dalam jabatan politik dan jabatan publik dilakukan melalui suatu proses seleksi dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.”* serta pasal 60 mengenai keterwakilan perempuan ayat (1) yang berbunyi : *“Struktur dan komposisi keseluruhan DPP Partai disusun wajib memperhatikan keterwakilan 30% (tiga puluh perseratus) perempuan.”* dan ayat (2) yang berbunyi : *“Struktur dan komposisi DPD Partai dan DPC Partai disusun wajib memperhatikan keterwakilan 30% (tiga puluh perseratus) perempuan.”*

PDI-P Sumatera Selatan saat ini memiliki ±13.000 orang pengurus, mulai dari badan sayap, saksi, anak ranting, ranting, Pimpinan Anak Cabang (PAC), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD). DPD PDI-P Sumatera Selatan memiliki 23 orang pengurus, 6 diantaranya perempuan dengan presentase sebesar 26%. Angka tersebut tentu belum mencapai angka 30% sesuai dengan pasal 60 AD/ART partai. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan perolehan kursi di DPRD Sumsel. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemilu di tiga edisi terakhir yaitu pemilu 2009, 2014 dan pemilu 2019 di Sumatera Selatan, dimana jumlah kursi anggota perempuan dari fraksi PDI-P selalu mengalami peningkatan. Bahkan, di dua edisi terakhir selalu melebihi angka 30%. Pada pemilu 2014, PDI-P menempatkan 4 anggota perempuan dari 13 anggota (30,76%) dan pada pemilu 2019 berhasil menempatkan 6 anggota perempuan dari 11 anggota (54,54%), terbanyak dari fraksi partai lain di DPRD Sumatera Selatan.

Tabel 1. 1
Jumlah Anggota DPRD SUMSEL Fraksi PDI-P

Periode	Jml. Kursi	Jenis Kelamin	
		Perempuan	Laki-Laki
2009-2014	10	1	9
2014-2019	13	4	9
2019-2024	11	6	5

Sumber : dprd.sumselprov.go.id

Pemberdayaan perempuan adalah usaha yang terstruktur dan terencana untuk mewujudkan kesetaraan serta keadilan gender dalam keluarga, masyarakat, dan politik. Proses pemberdayaan ini dilakukan melalui partai politik sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia, dengan mengakui bahwa potensi perempuan setara dengan laki-laki baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kenyataannya, dalam ranah politik, kita dapat mengamati bahwa status dan peran perempuan dalam masyarakat masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki dan belum mencapai kesetaraan.

Peran perempuan dalam ranah domestik dan politik merupakan fenomena global. Perubahan lanskap politik di Indonesia menjadikan keterwakilan perempuan sebagai narasi penting dalam demokrasi Indonesia. Perempuan Indonesia mempunyai hak penuh untuk menjadi aktor politik. Dengan potensi yang dimilikinya sebagai modal politik, keterampilan dan pemilih, partisipasi perempuan Indonesia dalam kancah politik menjadi hal yang sangat penting. Sebaliknya perempuan harus berpindah dari ranah domestik ke ranah politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali perspektif perempuan dan mengungkap peran partai politik dalam pengkaderan calon anggota parlemen perempuan.

Hal inilah yang menjadi gagasan sentral peneliti untuk mengkaji peran partai politik untuk meningkatkan kompetensi perempuan baik secara kuantitas maupun kualitas, potensi, skill dan konstituen sebagai modal menjadi bakal calon legislatif. Pentingnya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan dalam praktiknya, dan sejauh mana intervensi mendukung pemberdayaan. Pemberdayaan perempuan berarti

mereka diharapkan berpartisipasi secara setara dalam proses pembangunan sehingga mereka dapat menguasai faktor-faktor produksi sama seperti laki-laki. Pembangunan berarti mengatasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang. Kajian ini juga mengkaji proses dan peran partai politik dalam memungkinkan kader calon anggota parlemen perempuan mengambil peran strategis dalam pemerintahan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran DPD PDI-P Sumatera Selatan dalam Mengkaderisasi Bakal Calon Legislatif Perempuan (Studi Pada Pengurus Bidang Kaderisasi)”**

1.2 Rumusan Masalah

Terdapatlah masalah utama yang muncul berdasarkan latar belakang pada penelitian “Peran DPD PDI-P Sumatera Selatan dalam Mengkaderisasi Bakal Calon Legislatif Perempuan (Studi Pada Pengurus Bidang Kaderisasi)”. Untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman, maka dari itu rumusan masalah tersebut diturunkan menjadi:

1. Bagaimana peran Bidang Kaderisasi DPD PDI-P Sumatera Selatan dalam mengkaderisasi bakal calon legislatif perempuan?
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh Bidang Kaderisasi DPD PDI-P Sumatera Selatan dalam mengkaderisasi bakal calon legislatif perempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memahami peran Bidang Kaderisasi DPD PDI-P Sumatera Selatan dalam mengkaderisasi bakal calon legislatif perempuan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami peran Bidang Kaderisasi DPD PDI-P Sumatera Selatan dalam mengkaderisasi bakal calon legislatif perempuan.

2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan yang dialami oleh Bidang Kaderisasi DPD PDI-P Sumatera Selatan dalam mengkaderisasi bakal calon legislatif perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber bacaan dan menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya..
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi khususnya politik dalam masyarakat di Universitas Sriwijaya Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam tentang studi penelitian mengenai peran bidang kaderisasi partai politik dalam mengkaderisasi bakal calon legislatif perempuan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas untuk memahami ataupun mengetahui pemecahan masalah yang berkaitan dengan peran bidang kaderisasi partai politik dalam mengkaderisasi bakal calon legislatif perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Alfian, Rokhmansyah. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminis*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Ambar, Teguh Sulistiyani. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Budiardjo, Miriam. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- David, Marsh & Gerry Stoker. (2010). *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Edison, Emron, Yohny Anwar, dan Imas Komariyah. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Friedman, J.. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers: Cambridge, USA.
- Ginanjari Kartasasmita. (1997). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pemnagunan yang Berakar Pada Masyarakat*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Ida, Laode. (2008). *Menegaskan Posisi Dewan Perwakilan Daerah, dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Ife, J. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives Vision Analysis & Practise*. Sydney: Addison Wesley Longman Australia Pty Ltd.
- Jill, Steans & Lloyd, Pettiford. (2009). *Hubungan Internasional Perspektif dan Tema*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muchammad Ali Syafa'at. (2010). *Parlemen Bikameral*. Malang: UB Press.
- Paxton, P., & Hughes, M. (2007). *Women, Politics, and Power: A Global Perspective*. Thousands Oaks: Sage Publications.
- Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Sunggono, Bambang. (1992). *Partai Politik Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiarsana Indonesia.
- Veithzal Rivai Zainal, S. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumber Jurnal

- Ardiansa, D. (2016). Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik*, 2(1), 71–99.
- Arka, I. K. (2021). Pengaruh Affirmative Action Terhadap Elektabilitas Calon Perempuan Dalam Pemilu 2019 Di Kota Denpasar. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(3), 749–762.
- Ayu, A. A. (2021). Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Bulukumba. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–13.
- Efendi, & Atika, R. (2021). ANALISIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF. *Qawwam: The Leader's Writing*, 2(1), 29–44.
- Jackelin Lotulung, L., Mulyana, D., & Shinta Dewi, E. A. (2018). Perempuan Dalam Politik Di Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 20(2), 138–144.
- Kurniawan, N. (2016). Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 714–736.
- Maulana, M. Y., Puji, A., & Neny, M. (2016). ANALISIS PERAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK DI DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPC PDI P) KOTA CIREBON. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(4), 271–280.
- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 25.

- Oktapiani, E. K., Bandiyah, & Mahaswari, M. (n.d.). Pemberdayaan Perempuan Dalam Partai Politik di Provinsi Bali (Studi Pada Partai PDIP, Demokrat dan PSI). 1–8.
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106.
- Putri, I. A. (2017). Strategi Politik Perempuan Caleg Sumatera Barat Dalam Pemilu 2014. *Journal of Moral and Civic Education*, 1(2), 74–85.
- Qorib, F. (2020). Persepsi Hoax Politik Caleg Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kota Malang. *Warta ISKI*, 3(1), 13–22.
- Ramadhany, D., & Rahmawati, D. E. (2020). Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 39–62.
- Raqim, U. (2017). Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga. *Unnes Political Science Journal*, 1(1), 88–97.
- Rohmata, Y., Murtadlo, A., & D, D. (2018). Perjuangan Tokoh Utama Dalam Novel Pelabuhan Terakhir Karya Roidah : Kajian Feminisme Liberal. *Jurnal Lmu Budaya*, 2(3), 221–232.

Sumber Lainnya

- Damhuri, E. (2017). *Ideologi PDIP*. Republika.co.id.
<https://www.republika.co.id/berita/ox1z2m440/ideologi-pdip>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.
- DPRD Prov Sumsel. (2021). *Fraksi*. DPRD SUMSEL.
<https://dprd.sumselprov.go.id/>. Diakses pada tanggal 30 September 2021.
- Mashabi, S. (2020). *KPU Sebut Jumlah Caleg Perempuan di Pemilu 2019 Paling Tinggi*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/14575351/kpu-sebut-jumlah-caleg-perempuan-di-pemilu-2019-paling-tinggi>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2021.
- Statistik Badan Pusat. (2015). *Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin, 1955-2014*. BPS.
<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1172/anggota-dewan-perwakilan-rakyat-dpr-menurut-jenis-kelamin-1955-2014.html>. Diakses pada tanggal 30 September 2021

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43012>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.
Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38859/uu-no-2-tahun-2008>.
Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.